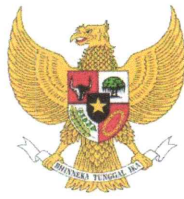




**RINGKASAN  
LAPORAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH  
(R-LPPD)  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
TAHUN 2024**



## BUPATI KEPULAUAN SELAYAR PROVINSI SULAWESI SELATAN

### KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji dan Syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat, karunia serta perkenan-Nya, Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 yang merupakan amanat konstitusional dapat diselesaikan.

Ruang lingkup laporan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, antara lain:

- a. Capaian kinerja makro;
- b. Ringkasan capaian kinerja urusan pelayanan dasar;
- c. Hasil EPPD dan opini atas laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya;
- d. Ringkasan realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah; dan
- e. Inovasi daerah.

Gambaran kinerja tahun ini merupakan sebuah implementasi kebijakan dalam penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. Sudah pasti dengan segala keterbatasan, kekurangan, kelemahan yang menyebabkan belum optimalnya beberapa hal dalam proses pencapaian target kinerja pada tahun 2024, akan kami jadikan sebagai salah satu bahan evaluasi untuk dijadikan pedoman bagi penyempurnaan kinerja pada tahun mendatang. Segala saran, pendapat maupun kritik yang bersifat konstruktif, sangat kami harapkan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas kami ke depan.

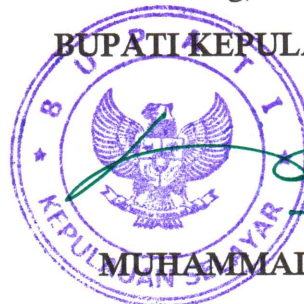
Akhirnya, kepada seluruh pihak yang telah membantu dan berpartisipasi aktif dalam penyelesaian laporan ini, kami sampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar besarnya, seraya berharap, semoga segala upaya kita dalam berkiprah membangun Kepulauan Selayar, senantiasa memperoleh petunjuk serta ridha Allah SWT.

Sekian dan Terima Kasih

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Benteng, 26 Maret 2025

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUHAMMAD NATSIR ALI

## **I. PENDAHULUAN**

Untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik maka kepala daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang meliputi LPPD, LKPJ, dan RLPPD.

LPPD merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. Dari hasil LPPD tersebut, Pemerintah Pusat melakukan EPPD dalam rangka penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kepala daerah wajib menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan laporan yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Selain menyampaikan LPPD dan LKPJ, kepala daerah juga wajib menyampaikan dan mempublikasikan RLPPD kepada masyarakat yang memuat capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran sebagai perwujudan transparansi dan akuntabilitas kepala daerah. Masyarakat dapat memberikan tanggapan atas RLPPD kepada kepala daerah sebagai bahan masukan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai ruang lingkup, penyusunan, dan penyampaian LPPD, LKPJ, dan RLPPD, pelaksanaan EPPD, dan sistem informasi elektronik LPPD dan EPPD.

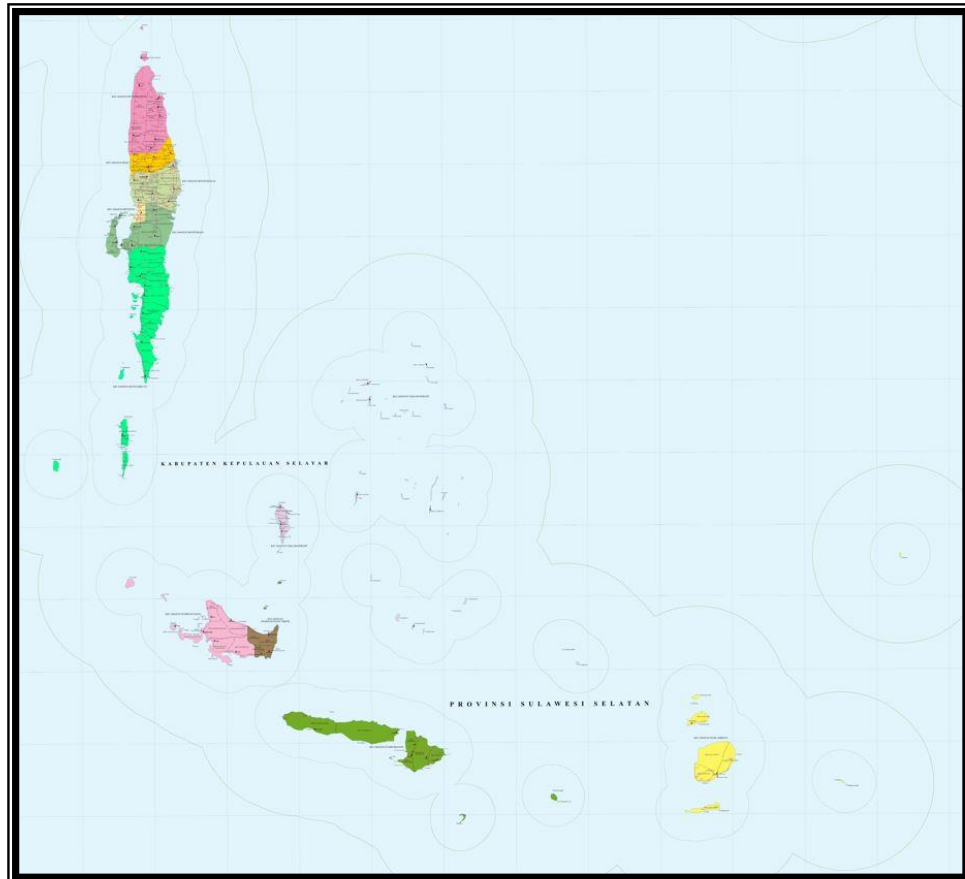
## **II. GAMBARAN UMUM DAERAH**

Secara astronomis, Kabupaten Kepulauan Selayar terletak antara 5°40'~7°35' Lintang Selatan dan 120°15'~122°30' Bujur Timur. Secara geografis, Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan gugusan pulau yang terletak di ujung selatan Jazirah Sulawesi yang secara administratif menjadi bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu kabupaten dan satu-satunya kabupaten yang terpisah dari Pulau Sulawesi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Flores ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Flores dan Selat Makassar;
- Sebelah Selatan dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**Gambar 1.1**

**Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar**



Sumber: Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) Tahun 2008

Luas keseluruhan wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah 10.503,69 km<sup>2</sup> dimana luas daratan 1.357,03 km<sup>2</sup>, sedangkan luas laut 9.146,66 km<sup>2</sup>, dengan panjang garis pantai 670 km.

Secara administratif, Kabupaten Kepulauan Selayar terbagi menjadi 11 (sebelas) kecamatan, 81 (delapan puluh satu) desa dan 7 (tujuh) kelurahan. Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016, yang kemudian ditegaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan

Selayar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami perubahan yang kemudian dilakukan penyesuaian-penyesuaian sehingga organisasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar terbagi atas, 3 Staf Ahli Bupati, 3 Asisten Sekretaris Daerah, 9 Bagian pada Sekretariat Daerah dan 1 Sekretariat DPRD, 1 Inspektorat Daerah, 19 Dinas, 4 Badan dan 11 Kecamatan.

Dalam hal produk hukum yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di tahun 2024 telah dihasilkan produk hukum daerah yang terdiri dari 6 Peraturan Daerah, 61 Peraturan Bupati, dan 623 Keputusan Bupati. Sementara Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar untuk Data Tahun 2024, Sekitar 4.231 Aparatur Sipil Negara dari instansi nonvertikal bekerja di Kepulauan Selayar. Berdasarkan pendidikan sebanyak 4.218 ASN memiliki pendidikan SMA keatas. Untuk persebaran Golongan Kepangkatan, 8 ASN berada di golongan I, sebanyak 234 ASN berada di golongan II, dan 2.221 ASN berada di golongan III serta 774 ASN berada di golongan IV.

### **III. CAPAIAN KINERJA MAKRO**

Capaian kinerja makro daerah adalah gambaran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum yang dihasilkan dari berbagai program pemerintah daerah, pusat, swasta, dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Adapun laju kinerja makro Kabupaten Kepulauan Selayar dari tahun 2023 sampai tahun 2024, sebagai berikut :

**Tabel 1**  
**Capaian Kinerja Makro**

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024	Laju Kinerja (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	71,13	71,98	1,19
2	Angka Kemiskinan	12,27	10,79	-12,06
3	Angka Pengangguran	1,98	2,05	3,53
4	Pertumbuhan Ekonomi	3,68	3,33	-9,51
5	Pendapatan Per kapita	56,57	58,29	3,04
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,345	0,329	-4,63

Keterangan : \* Data belum di rilis oleh BPS Kepulauan Selayar

Sumber Data : BPS Kepulauan Selayar 2025

#### **IV. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**

Capaian urusan wajib pelayanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta social.

Capaian kinerja pelayanan dasar Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024, sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

**Tabel 2**  
**Capaian Indikator Kinerja Hasil Pada Urusan Pelayanan Dasar Tahun 2024**

NO.	INDIKATOR KINERJA OUTCOME	CAPAIAN KINERJA (%)	OPD
<b>A</b>	<b>URUSAN PENDIDIKAN</b>		
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	95,97 %	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga



NO.	INDIKATOR KINERJA OUTCOME	CAPAIAN KINERJA (%)	OPD
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	97,62 %	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	81,60 %	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	79,48 %	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
<b>B</b>	<b>URUSAN KESEHATAN</b>		
1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	0,093 %	Dinas Kesehatan
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100 %	Dinas Kesehatan
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100 %	Dinas Kesehatan
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	99,48 %	Dinas Kesehatan
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100 %	Dinas Kesehatan
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	94,03 %	Dinas Kesehatan
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	92,23 %	Dinas Kesehatan
8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	93,16 %	Dinas Kesehatan
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	68,86 %	Dinas Kesehatan
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	85,44 %	Dinas Kesehatan
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	Dinas Kesehatan
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100 %	Dinas Kesehatan
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100 %	Dinas Kesehatan

NO.	INDIKATOR KINERJA OUTCOME	CAPAIAN KINERJA (%)	OPD
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100 %	Dinas Kesehatan
<b>C</b>	<b>URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>		
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	100 %	Dinas PUTR
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	100 %	Dinas PUTR
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	5,24	Dinas PUTR
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	43,04 %	Dinas PUTR
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	5,63 %	Dinas PUTR
6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	116,67	Dinas PUTR
7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	54,58 %	Dinas PUTR
8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	10,23 %	Dinas PUTR
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100 %	Dinas PUTR
<b>D</b>	<b>PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>		
1	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	76,85 %	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman



NO.	INDIKATOR KINERJA OUTCOME	CAPAIAN KINERJA (%)	OPD
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	36,71 %	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
<b>E</b>	<b>KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>		
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100 %	Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	63,63 %	Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	BPBD
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	BPBD
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	BPBD
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	85 %	Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	8,35 menit	Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan
<b>F</b>	<b>SOSIAL</b>		
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100 %	Dinas Sosial
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100 %	Dinas Sosial

## V. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA;

### 1. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 Kabupaten Kepulauan Selayar berhasil mendapatkan hasil EPPD dengan skor kinerja 3,07 dengan status kinerja Sedang. Capaian ini meningkat 0,73 dari hasil EPPD tahun 2022 dengan skor 2,34.

## 2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Opini BPK atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Laporan Nomor 32.B/LHP/XIX.MKS/ 05/2024, Kabupaten Kepulauan Selayar berhasil mencapai opini WTP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2023, dari target WTP dengan persentase 100%. Opini BPK atas laporan keuangan diperoleh dari Hasil Audit BPK RI terhadap LKPD tahun 2023.

**Tabel 3**

### **Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

<b>No.</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Tahun</b>	<b>Opini BPK</b>
1	Opini BPK atas LKPD 2023	2024	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Kabupaten Kepulauan Selayar mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Tahun 2024. Raihan Opini WTP dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar telah diperoleh sebanyak 8 kali secara berturut-turut sejak tahun 2016-2023. Merupakan kebanggaan sekaligus pencapaian yang maksimal atas pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam hal pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah. Untuk itu, ke depannya, prestasi ini harus terus menerus dipertahankan dengan cara meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah, khususnya dalam transparansi pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan APBD, sehingga publik dapat mengakses informasi yang handal terkait capaian dari pengelolaan APBD Kabupaten Kepulauan Selayar.

## **VI. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH**

Gambaran kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 merupakan gambaran keuangan *unaudited* (sebelum keluarnya hasil audit oleh BPK). Gambaran ini terdiri atas target dan realisasi keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024.

**a. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan**

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah. Pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan Daerah Tahun 2024 pada Perubahan Anggaran dan Pendapatan Daerah Tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp.1.075.945.932.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 998.636.080.127,59 dengan capaian realisasi sebesar 92,81%, adapun realisasi pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2024 berdasarkan kelompok pendapatan dan jenis-jenis pendapatan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah meliputi pajak daerah; retribusi daerah; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Target Pendapatan Asli Daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.109.660.630.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 81.074.651.968,59 dengan capaian realisasi anggaran sekitar 73,93%. Adapun realisasi Pendapatan Asli Daerah tersebut digambarkan dalam tabel berikut ini :

**Tabel 4**  
**Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024**

URAIAN		TARGET	REALISASI	SISA LEBIH / (KURANG)	%
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>		<b>109.660.630.000,00</b>	<b>81.074.651.968,59</b>	<b>(28.585.978.031,41)</b>	<b>73,93</b>
1	Pajak Daerah	28.271.091.400,00	13.600.326.209,00	14.670.765.191,00	48,11
2	Retribusi Daerah	47.922.113.000,00	47.644.653.893,00	277.459.107,00	99,42
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	12.778.500.000,00	12.005.751.676,20	772.748.323,80	93,95
4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	20.688.925.600,00	7.823.920.190,39	12.865.005.409,61	37,82

Sumber : Laporan Realisasi Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar unaudit BPK RI.

2. Pendapatan Transfer dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 960.523.452.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 917.561.428.159,00 dengan capaian realisasi anggaran sekitar 95,53%. Adapun realisasi Dana Perimbangan Daerah Tahun 2023 tersebut digambarkan dalam tabel berikut ini :

**Tabel 5**  
**Realisasi Dana Perimbangan Daerah Tahun 2024**

URAIAN		TARGET	REALISASI	SISA LEBIH / (KURANG)	%
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>		<b>960.523.452.000,00</b>	<b>917.561.428.159,00</b>	<b>42.962.023.841,00</b>	<b>95,53</b>
<b>A. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan</b>		<b>800.364.105.000,00</b>	<b>790.279.540.703,00</b>	<b>10.084.564.297,00</b>	<b>98,74</b>
1	Dana Bagi Hasil	15.375.649.000,00	15.401.372.000,00	(25.723.000,00)	100,17
2	Dana Alokasi Umum	620.900.520.000,00	620.495.260.651,00	405.259.349,00	99,93
3	Dana Alokasi Khusus Fisik	44.244.896.000,00	42.731.502.855,00	1.513.393.145,00	96,58
4	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	119.843.040.000,00	111.651.405.197,00	8.191.634.803,00	93,16
<b>B. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya</b>		<b>89.187.044.000,00</b>	<b>86.787.635.000,00</b>	<b>2.399.409.000,00</b>	<b>97,31</b>
1	Dana Desa	67.830.496.000,00	65.431.087.000,00	2.399.409.000,00	96,46
2	Insentif Fiskal	21.356.548.000,00	21.356.548.000,00	0,00	100,00
<b>C. Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>		<b>70.972.303.000,00</b>	<b>40.494.252.456,00</b>	<b>30.478.050.544,00</b>	<b>57,06</b>
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	53.458.831.000,00	26.405.597.145,00	27.053.233.855,00	49,39
2	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	17.513.472.000,00	14.088.655.311,00	3.424.816.689,00	80,44

Sumber : Laporan Realisasi Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar unaudit BPK RI.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.5.761.850.000,00 dan tidak terealisasi sama sekali atau dengan capaian realisasi anggaran 0,00%. Adapun realisasi Pendapatan Lain-lain Daerah yang sah untuk Tahun 2024 tersebut digambarkan dalam tabel berikut ini :

**Tabel 6**  
**Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2024**

URAIAN		TARGET	REALISASI	SISA LEBIH / (KURANG)	%
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>		<b>5.761.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.761.850.000,00</b>	<b>0,00</b>
1	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	5.761.850.000,00	0,00	5.761.850.000,00	0,00

Sumber : Laporan Realisasi Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar unaudit BPK RI.

**b. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja**

Belanja Daerah pada perubahan APBD Tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp. 1.121.539.457.234,00 dan terealisasi sebesar Rp. 968.623.630.481,38 dengan capaian realisasi sebesar 86,37%, adapun realisasi belanja daerah pada Tahun Anggaran 2024 berdasarkan kelompok belanja dan jenis-jenis belanja daerah disajikan pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 7**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2024**

URAIAN		TARGET	REALISASI	SISA LEBIH / (KURANG)	(%)
<b>Belanja Daerah</b>		<b>1.121.539.457.234,00</b>	<b>968.623.630.481,38</b>	<b>152.915.826.752,62</b>	<b>86,37</b>
<b>Belanja Operasi</b>		<b>810.757.880.628,00</b>	<b>752.276.889.134,38</b>	<b>58.480.991.493,62</b>	<b>92,79</b>
1	Belanja Pegawai	445.759.240.505,00	421.937.421.030,76	23.821.819.474,24	94,66
2	Belanja Barang dan Jasa	311.334.935.234,00	284.692.232.048,62	26.642.703.185,38	91,44
3	Belanja Subsidi	5.000.000.000,00	0,00	5.000.000.000,00	0,00
4	Belanja Hibah	46.384.757.889,00	43.397.402.055,00	2.987.355.834,00	93,56
5	Belanja Bantuan Sosial	2.278.947.000,00	2.249.834.000,00	29.113.000,00	98,72

URAIAN		TARGET	REALISASI	SISA LEBIH / (KURANG)	(%)
<b>Belanja Modal</b>		<b>170.807.153.166,00</b>	<b>145.606.619.567,00</b>	<b>25.200.533.599,00</b>	<b>85,25</b>
1	Belanja Modal Tanah	960.060.000,00	512.154.500,00	447.905.500,00	53,35
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.788.048.470,00	18.146.622.784,00	1.641.425.686,00	91,70
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	76.787.580.471,00	71.973.982.522,00	4.813.597.949,00	93,73
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	72.691.554.225,00	54.397.846.811,00	18.293.707.414,00	74,83
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	336.000.000,00	334.572.950,00	1.427.050,00	99,58
6	Belanja Modal Aset Lainnya	243.910.000,00	241.440.000,00	2.470.000,00	98,99
<b>Belanja Tidak Terduga</b>		<b>7.238.779.000,00</b>	<b>6.378.386.300,00</b>	<b>860.392.700,00</b>	<b>88,11</b>
1	Belanja Tidak Terduga	7.238.779.000,00	6.378.386.300,00	860.392.700,00	88,11
<b>Belanja Transfer</b>		<b>132.735.644.440,00</b>	<b>64.361.735.480,00</b>	<b>68.373.908.960,00</b>	<b>48,49</b>
1	Belanja Bagi Hasil	2.183.257.440,00	1.641.045.485,00	542.211.955,00	75,17
2	Belanja Bantuan Keuangan	130.552.387.000,00	62.720.689.995,00	67.831.697.005,00	48,04

Sumber : Laporan Realisasi Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar unaudit BPK RI.

1. Belanja Operasi dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 810.757.880.628,00 dan terealisasi sebesar Rp. 752.276.889.134,38 dengan capaian realisasi sekitar 92,79%.
2. Belanja Modal dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 170.807.153.166,00 dan terealisasi sebesar Rp. 145.606.619.567,00 dengan capaian realisasi sekitar 85,25%.
3. Belanja Tidak Terduga dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 7.238.779.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.378.386.300,00 dengan capaian realisasi sekitar 88,11%.
4. Transfer/Bagi Hasil pada perubahan APBD Tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp. 132.735.644.440,00 dan terealisasi sebesar Rp. 64.361.735.480,00 dengan capaian realisasi sebesar 48,49%.



**c. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan**

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Pembiayaan Daerah pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yakni berasal dari penerimaan pembiayaan yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, adapun realisasi pembiayaan daerah pada Tahun Anggaran 2024 berdasarkan kelompok pembiayaan sebagai berikut :

**Tabel 8**  
**Realisasi Pembiayaan Berdasarkan Jenis Pembiayaan TA. 2024**

URAIAN		TARGET	REALISASI	SISA LEBIH / (KURANG)	(%)
Surplus/ Defisit		(45.593.525.234,00)	30.012.449.646,21		
Pembiayaan Daerah		45.813.525.234,00	0,00	45.813.525.234,00	0,00
Penerimaan Pembiayaan		45.813.525.234,00	0,00	45.813.525.234,00	0,00
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	45.813.525.234,00	0,00	45.813.525.234,00	0,00
Pembiayaan Netto		45.813.525.234,00	0,00	45.813.525.234,00	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		220.000.000,00	30.012.449.646,21	(29.792.449.646,21)	

Sumber : Laporan Realisasi Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar unaudit BPK RI.

## VII. INOVASI DAERAH

Inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah, yang sasarannya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah.

Berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 353/VIII/Tahun 2024 tentang Penetapan Inovasi Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, terdapat inovasi daerah sebagai berikut :

**Tabel 9**  
**Daftar Inovasi Daerah Tahun 2024**

NO.	NAMA INOVASI	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
1	Sistem Informasi Gerakan Efektif dan Efisien Data Pemuda Terpadu (SI GESIT)	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga / Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	Optimalisasi Penanganan Kumuh Melalui Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Pada Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah Sepuluh Hektar (SIRUMAHKU SEHAT)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
3	Gerakan Sekolah Tertib dan Aman (GESEKTAMAN)	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
4	Optimalisasi Pembinaan Praja yang Humanis, Profesional dan Berintegritas (OPERASI TAS)	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
5	Implementasi Program Kampung Iklim Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Tapak sebagai Upaya Membangun Desa Mandiri di Kabupaten Kepulauan Selayar	Dinas Lingkungan Hidup
6	Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Desa (SIPP Desa)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa / Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
7	Sentra Informasi Produk Lokal Daerah (SIP OK DEH)	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Sumber : Bapperida 2025

## VIII. PENGHARGAAN YANG DIRAIH PADA TAHUN 2024

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2024 mendapatkan 5 (lima) penghargaan dari Pemerintah Pusat dan Stkeholder lainnya. Adapun penghargaan tersebut sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

**Tabel 10**  
**Daftar Penghargaan Yang Diterima Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar**  
**Tahun 2024**

NO.	NAMA PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN
1.	Penghargaan Adipura Tahun 2023	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
2.	Bupati Basli Ali dinobatkan Sebagai Kepala Daerah Terbaik Pendukung Pengelolaan Zakat 2024	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
3.	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar menerima penghargaan dari CNN Indonesia Awards 2024 Kategori Outstanding Sustainable Tourism Practice.	CNN Indonesia
4.	Bupati H. Muh. Basli Ali Terima Piagam Penghargaan sebagai Bapak Badan Permusyawaratan Desa (BPD).	Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Se Indonesia (PABPDSI) Pusat
5.	Pemerintah kabupaten Kepulauan Selayar Melalui UPT Puskesmas Benteng Dinyatakan Lulus Akreditasi Paripurna.	Kementerian Kesehatan RI

Sumber : Diskominfo SP 2025

## IX. PENUTUP

Demikian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024, disadari sepenuhnya bahwa penyelenggaraan pemerintahan merupakan komitmen bersama untuk melayani, memberdayakan dan membangun masyarakat. Oleh karena itu saya mengajak kepada seluruh komponen masyarakat, beserta seluruh aparatur pemerintah daerah untuk terus bekerja keras dalam mengimplementasikan visi dan misi Kabupaten Kepulauan Selayar kearah peningkatan kesejahteraan yang lebih baik dimasa yang akan datang, Semoga Allah SWT selalu memberikan taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Benteng, 26 Maret 2025



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

**MUHAMMAD NATSIR ALI**